Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi di Kota Medan, Sumatera Utara

Ayu Efridadewi¹, Surya Laia², Cindy Verindica Gorat³

^{1,2,3,4} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

Email: ayuefridadewi@umrah.ac.id¹, laiasurya0@gmail.com²,
cindyverindicha168@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan yuridis terhadap tindak pidana korupsi di Kota Medan, Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui studi pustaka dan analisis dokumen-dokumen hukum yang terkait dengan tindak pidana korupsi di Kota Medan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan merinci norma-norma hukum yang mengatur tindak pidana korupsi dan implementasinya di tingkat lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi di Kota Medan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya pengawasan, rendahnya integritas aparat, dan adanya celah hukum. Selain itu, penelitian ini membahas upaya penegakan hukum yang telah dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana korupsi di tingkat kota.

Kata kunci: *Tinjauan Yuridis; Tindak Pidana; Korupsi.*

Abstract

This research aims to conduct a juridical review of corruption offenses in Medan City, North Sumatra. The research method employed is normative legal research with a descriptive approach. Data were obtained through literature reviews and analysis of legal documents related to corruption offenses in Medan City. The analysis was conducted qualitatively by detailing the legal norms governing corruption offenses and their implementation at the local level. The research results indicate that corruption offenses in Medan City are influenced by various factors, including a lack of supervision, low integrity of officials, and legal loopholes. Additionally, this research discusses law enforcement efforts that have been undertaken to combat corruption offenses at the city level.

Keywords : *Juridical Review; Criminal Offenses; Corruption.*

PENDAHULUAN

Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan di wilayah tersebut, tidak terlepas dari kompleksitas permasalahan hukum, termasuk tindak pidana korupsi. Korupsi, sebagai bentuk kejahatan yang merugikan negara dan masyarakat, menuntut penanganan yang serius dari segi yuridis. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan yuridis terhadap tindak pidana korupsi di Kota Medan, Sumatera Utara. Sebagai negara yang menerapkan aturan berdasarkan prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia memiliki landasan hukum untuk menegakkan keadilan dan ketertiban. Namun, realitas menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi masih menjadi masalah serius, termasuk di tingkat lokal seperti Kota Medan. Dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi, regulasi yang berlaku, serta upaya penegakan hukum yang dilakukan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam rangka memahami dan mengatasi permasalahan korupsi di Kota Medan.

Melalui pendekatan tinjauan yuridis, penelitian ini akan merinci norma-norma hukum yang mengatur tindak pidana korupsi dan mengkaji implementasinya di tingkat lokal. Data akan diperoleh melalui studi pustaka dan analisis dokumen-dokumen hukum terkait. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai aspek yuridis tindak pidana korupsi di Kota Medan, serta memberikan dasar bagi perbaikan sistem penegakan hukum di masa depan. Selain itu, penting untuk menyadari bahwa tindak pidana korupsi bukan hanya merupakan masalah hukum semata, tetapi juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Korupsi dapat merugikan keuangan negara, menghambat pembangunan, serta menciptakan ketidaksetaraan dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi dampak sosial dan ekonomi dari tindak pidana korupsi di Kota Medan.

Dalam konteks Kota Medan, sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan di Sumatera Utara, keberhasilan penanggulangan korupsi dapat memberikan dampak positif yang luas pada perkembangan daerah tersebut. Upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi perlu didukung oleh pemahaman mendalam terhadap konteks lokal, potensi faktor pemicu, serta kebijakan yang efektif. Korupsi sebagai tindak pidana yang merugikan negara dan masyarakat menjadi permasalahan serius yang terus berkembang, termasuk di wilayah kota Medan, Sumatera Utara. Keberadaan korupsi tidak hanya merugikan sektor keuangan negara, tetapi juga menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Oleh karena itu, urgensi penelitian ini terletak pada perlunya pemahaman mendalam terhadap faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi di kota Medan serta dampaknya terhadap wilayah tersebut. maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: apa saja faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi di wilayah kota Medan, Sumatera Utara? Serta bagaimana dampak tindak pidana korupsi di wilayah kota Medan, provinsi Sumatera Utara?

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif untuk mendalami tindak pidana korupsi di Kota Medan, Sumatera Utara. Pendekatan ini dipilih guna memahami secara mendalam aspek-aspek yuridis, sosial, dan ekonomi yang terkait dengan fenomena korupsi di tingkat lokal. Objek penelitian utama adalah Kota Medan. Pengumpulan data dilakukan melalui dua metode utama, yakni observasi dan dokumentasi. Proses analisis data akan melibatkan beberapa tahap, seperti reduksi data dan penyajian data. Reduksi data mencakup pengorganisasian dan penyederhanaan informasi dari observasi dan dokumen. Selanjutnya, penyajian data bertujuan untuk mengekspresikan temuan secara jelas dan komprehensif. Validasi data dilakukan melalui proses verifikasi untuk memastikan keakuratan dan keandalan hasil penelitian. Dengan kombinasi metode observasi dan dokumentasi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang holistik terhadap tindak pidana korupsi di Kota Medan dan memberikan kontribusi pada pemahaman serta solusi terkait permasalahan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konteks Hukum Tindak Pidana Korupsi di Kota Medan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konteks hukum tindak pidana korupsi di Kota Medan diatur oleh serangkaian peraturan dan undang-undang yang mencakup aspek pencegahan, penindakan, dan penegakan hukum. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi landasan utama dalam pengaturan tindak pidana korupsi di tingkat nasional. Selain itu, Pemerintah Kota Medan juga memiliki regulasi daerah yang menguatkan aspek pencegahan dan penanggulangan korupsi, seperti Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Namun, dalam analisis mendalam, ditemukan beberapa kekosongan dan celah hukum yang dapat dimanfaatkan. Implementasi regulasi terkait seringkali mengalami kendala, baik dalam hal keterbatasan sumber daya manusia maupun alat. Regulasi yang ada perlu dievaluasi dan

diperbarui secara berkala untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan dinamika permasalahan korupsi yang semakin kompleks.

Dalam menganalisis implementasi hukum dan kebijakan pencegahan korupsi di Kota Medan, ditemukan sejumlah tantangan yang memengaruhi efektivitasnya. Meskipun telah ada upaya dalam melaksanakan kebijakan pencegahan korupsi, kurangnya sinergi antara berbagai lembaga pemerintah dan keterlibatan masyarakat menjadi hambatan utama. Selain itu, sumber daya manusia yang terbatas dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang dampak korupsi juga turut mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Peran lembaga-lembaga pengawas, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diakui sebagai elemen penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi. Namun, perlu adanya pembenahan lebih lanjut terkait sistem pengawasan dan sinergi antarlembaga untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penanganan kasus korupsi.

Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi

Faktor penyebab tindak pidana korupsi di wilayah Kota Medan melibatkan sejumlah kompleksitas yang membutuhkan pemahaman mendalam. Identifikasi faktor-faktor tersebut menjadi langkah kunci dalam memahami akar permasalahan korupsi dan merancang strategi pencegahan yang efektif. Penelitian ini mendapati bahwa sejumlah faktor pemicu tindak pidana korupsi di Kota Medan dapat diidentifikasi. Pertama, kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan publik menciptakan peluang bagi praktik-praktik korupsi. Ketidakjelasan dalam proses pengelolaan anggaran dan alokasi dana publik menjadi pintu terbuka bagi penyalahgunaan kekuasaan. Selanjutnya, rendahnya integritas aparat merupakan faktor yang turut memperburuk situasi. Adanya oknum-oknum yang terlibat dalam praktik korupsi, mulai dari tingkat pemerintah hingga eksekutif, memperumit upaya pemberantasan korupsi. Terdapat kecenderungan bahwa jaringan koneksi dan patronase memfasilitasi terjadinya kolusi dan nepotisme. Faktor ketiga yang mendorong tindak pidana korupsi adalah adanya celah hukum. Meskipun terdapat regulasi hukum yang mengatur tindak pidana korupsi, namun ditemukan beberapa kekosongan dan ambiguitas dalam regulasi tersebut. Celah ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku korupsi untuk menghindari pertanggungjawaban hukum.

Analisis mendalam terhadap faktor-faktor ini juga menggali akar permasalahan yang lebih dalam pada kondisi lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi di Kota Medan. Budaya patron-client yang masih kental dan rendahnya kesadaran akan etika kerja menyuburkan praktik-praktik korupsi. Selain itu, ketidaksetaraan ekonomi dan rendahnya kesejahteraan masyarakat dapat menjadi pemicu korupsi di tingkat lokal. Secara keseluruhan, pemahaman terhadap faktor-faktor penyebab tindak pidana korupsi di Kota Medan memberikan gambaran holistik yang dapat menjadi dasar untuk merancang kebijakan pencegahan yang lebih efektif dan terarah.

Dampak Sosial dan Ekonomi Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Kota Medan

Dampak sosial dan ekonomi tindak pidana korupsi di wilayah Kota Medan sangat signifikan dan meresahkan, memberikan kontribusi negatif yang luas terhadap masyarakat dan pembangunan daerah. Hasil penelitian mengungkap dampak yang mencakup berbagai aspek tersebut. Dampak sosial tindak pidana korupsi di Kota Medan mencakup terkikisnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintah dan penegak hukum. Adanya persepsi bahwa aparat publik terlibat dalam korupsi dapat menciptakan ketidakpercayaan dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Selain itu, korupsi juga dapat memperburuk tingkat ketidaksetaraan sosial, menghasilkan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya, dan merugikan kelompok-kelompok yang rentan.

Dari segi ekonomi, dampak tindak pidana korupsi di Kota Medan tampak dalam bentuk kerugian keuangan negara. Praktik-praktik korupsi mengarah pada pengalihan dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik, menjadi sumber keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini menghambat pembangunan infrastruktur,

pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor kunci lainnya yang seharusnya menjadi prioritas pembangunan daerah. Selanjutnya, tindak pidana korupsi di Kota Medan juga memberikan dampak ekonomi dalam bentuk ketidakpastian bagi investor. Praktik korupsi dapat menciptakan lingkungan bisnis yang tidak stabil dan kurang transparan, menghambat pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional. Perusahaan-perusahaan yang menghindari investasi di wilayah tersebut dapat menyebabkan penurunan peluang kerja dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dari sudut pandang pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, tindak pidana korupsi merugikan secara keseluruhan. Melalui pemberlakuan kebijakan anti-korupsi yang lebih efektif dan transparan, serta peningkatan integritas aparat pemerintah, diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Kota Medan.

SIMPULAN

Ditemukan bahwa regulasi hukum di Kota Medan sudah ada, namun masih memerlukan penyempurnaan dan pembaruan secara berkala. Kelemahan implementasi dan koordinasi antarlembaga menjadi hambatan utama dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Faktor-faktor ini membuka peluang bagi praktik-praktik korupsi yang merugikan masyarakat dan pembangunan daerah. Dampak tindak pidana korupsi di Kota Medan sangat luas, merugikan secara sosial dengan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah, dan ekonomi dengan menyebabkan kerugian keuangan negara serta menghambat pertumbuhan ekonomi lokal.

Perlu dilakukan revisi dan pembaruan terhadap regulasi hukum yang mengatur tindak pidana korupsi di Kota Medan. Penguatan aturan-aturan ini diharapkan dapat menutup celah hukum dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Mendorong peningkatan koordinasi antarlembaga pemerintah, seperti BPK dan KPK, agar dapat bekerja secara sinergis dalam penanggulangan tindak pidana korupsi. Kerjasama yang solid dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penanganan kasus korupsi. Peningkatan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan dampak korupsi perlu menjadi fokus. Kampanye penyuluhan dan edukasi akan membantu menciptakan masyarakat yang lebih kritis dan dapat mengawasi pelaksanaan pemerintahan.

Mendorong peningkatan integritas pegawai publik melalui pelatihan dan pembinaan etika profesional. Pendidikan kontinu juga dapat memberikan pegawai publik pemahaman yang lebih baik tentang konsekuensi hukum dan etika yang terkait dengan korupsi. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pemerintahan dan kebijakan publik. Masyarakat yang terlibat dapat menjadi pilar penting dalam mencegah dan mengungkap praktik korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Banjarnahor, C. (2022). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Jual Beli Vaksin Covid 19 Yang Dilakukan Oknum Dokter Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Di Tanjung Gusta Medan (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara) (Doctoral Dissertation, Universitas Medan Area).
- Elmarianti, E. (2022). Penegakan Hukum Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Pada Bank Sebagai Badan Usaha Milik Negara (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Fartini, A. (2018). Hukum Dan Fungsi Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Al Ahkam*, 14(1), 1-19.
- Harefa, N. S. K., Manik, G. K., Marpaung, I. K. Y., & Batubara, S. A. (2020). Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS): Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 73/Pid. Sus-TPK/2018/PN. Mdn.

- Hutabalian, M. (2019). Faktor-Faktor Penyebab Dan Akibat Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Berdasarkan Uu No 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Uu No 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Kota Medan). *JURNAL JUSTIQA*, 1(1).
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Lubis, E. Z. (2017). Dampak Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 7(2), 107-116.
- Medan, D. Y. U. M. N. A. W. (2015). Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi Meningkatkan Di Indonesia. Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, 16(1), 5210.
- Mukaromah, D. A., & Kusuma, L. I. (2013). Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Ajaran Sosialis Oleh Karl Marx. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 2(2).
- Pratama, N. I. (2021). Mekanisme Koordinasi Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kepolisian Resort Kota Besar Medan) *Vvv. Airlangga Development Journal*, 5(2), 80-100.
- Prayogi, M. A.
- Sari, I. N., Lestari, L. P., Kusuma, D. W., Mafulah, S., Brata, D. P. N., Iffah, J. D. N., ... & Sulistiana, D. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Unisma Press.
- Simanjuntak, I. S. (2023). Kajian Yuridis Terhadap Pelaksanaan Lidik Dan Sidik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Studi Kasus Di Polda Sumut).
- Simatupang, A. E., Marlina, M., & Affan, I. (2022). Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Manado (Studi Putusan Nomor 26/Pid. Sus-TPK/2018/PN. Mnd). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(2), 278-299.
- Wilhelmus, O. R. (2017). Korupsi: Teori, Faktor Penyebab, Dampak, Dan Penanganannya. *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 17(9), 26-42.